

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM*  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI  
BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**ERICK MARCELINO PAPILAYA**  
**NPM. 0771010082**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2010**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR**

**Disusun Oleh :**

**Erick Marcelino Papilaya**  
**0771010082**

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur Pada Tanggal 27 April 2011**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

1. **Sutrisno, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001 (.....)
2. **Hariyo Sulistivantoro, SH, MM**  
NIP. 19620625 199103 1 001 (.....)
3. **Subani, S.H., M.Si**  
NIP. 19510504 198303 1 001 (.....)

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Hariyo Sulistivantoro, SH, MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa serta yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul: ” **KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR.**

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian dalam mengadakan penelitian guna penyusunan proposal.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

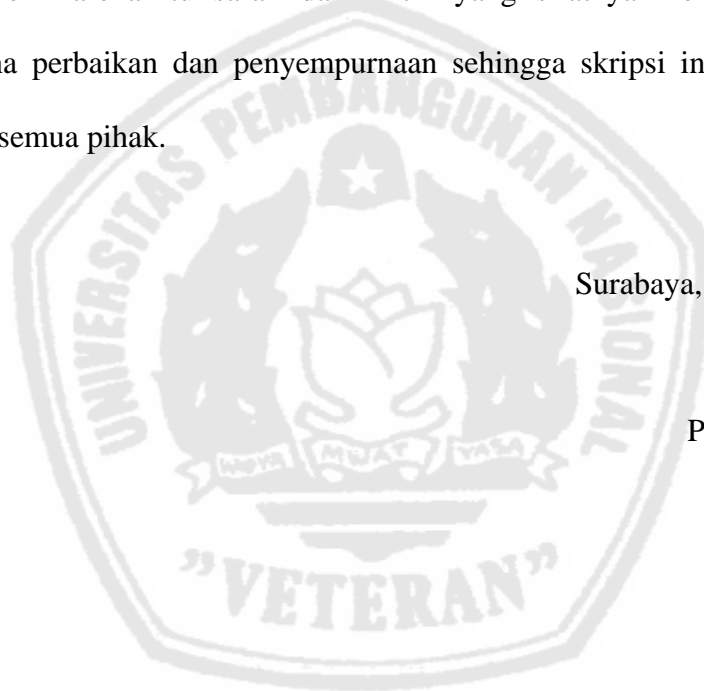
1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan dan selaku Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Selaku Dosen Pembimbing Utama.

3. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.kn Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. AKP. Herlina selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penulisan.
6. Bapak Abu Toyib SH selaku manager di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penulisan.
7. Bapak Rudy R selaku Staf di LSM Wahana Visi Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penulisan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Sariyanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kedua orang tua tercinta Papa Nino dan Mama Endang dan saudara-saudaraku Endo, Oteng, Prima, Edo cah gemblung imoet montok yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
11. Sahabat-sahabat bonek mangga Sandy, Squibson, Kristian Fery, Kohan dan teman-teman seperjuangan Puji, Renni, Rina, Tian, Arif, Dewi, Mbak Ita, Lia,

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, April 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	21
1.7 Sistematika Penelitian.....	23

## **BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM***

### **TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

<b>DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>28</b>
2.1 Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP .....	28
2.2 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan .....	30
2.2.1 <i>Visum et repertum</i> dalam kasus perkosaan .....	32
2.2.2 Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> .....	35
 <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK</b>	
<b>PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>40</b>
3.1 Tindakan Preventif .....	41
3.1.1 Internal .....	42
3.1.2 Eksternal .....	42
3.2 Tindakan Represif .....	48
3.2.1 Internal .....	48
3.2.2 Eksternal .....	49
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Model media gambar untuk tubuh anak laki-laki	44
Gambar 2 : Model media gambar untuk tubuh anak Perempuan	45
Gambar 3 : Mengenali pola kekerasan dengan menggunakan metode bermain boneka	46
Gambar 4 : Mengenali pola kekerasan seksual dengan bahasanya sendiri	46
Gambar 5 : Mengenali pola kekerasan seksual dengan bahasanya sendiri melalui bermain peran	47
Gambar 6 : Teknik perlindungan diri jika tangan dipegang Pelaku	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

- Lampiran 1: Contoh *Visum et Repertum*
- Lampiran 2: Data Kekerasan Lembaga Perlindungan Anak  
Jawa Timur Tahun 2008
- Lampiran 3: Data Kekerasan Lembaga Perlindungan Anak  
Jawa Timur Tahun 2009
- Lampiran 4: Data Kekerasan Lembaga Perlindungan Anak  
Jawa Timur Tahun 2010
- Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian dari Lembaga Perlindungan Anak
- Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian dari Wahana Visi
- Lampiran 7: Surat Keterangan Penelitian dari Polrestabes Surabaya
- Lampiran 8 : Ichtilisar Putusan Perkara Nomor :4102/Pid.B/2009/PN.Surabaya

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

**Nama Mahasiswa** : Erick Marcelino Papilaya  
**NPM** : 0771010082  
**Tempat Tanggal Lahir** : Surabaya, 07 November 1988  
**Program Studi** : Strata 1 (S1)  
**Judul Skripsi** :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan di bawah umur dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh keluarga, pihak Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap korban tindak pidana perkosaan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Polisi Resort Kota Besar Surabaya dan Lembaga Perlindungan Anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah mengenai alat-alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 184 ayat (1) : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam tindak pidana perkosaan di bawah umur dibutuhkan suatu alat bukti yang utama yaitu *visum et repertum*. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang penting dalam tahap penyidikan, dimana pada tahapan ini untuk menentukan suatu perkara itu dapat atau tidaknya dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses peradilan. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di bawah umur tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, tetapi perlu melibatkan seluruh instansi lainnya dan semua unsur masyarakat.

**Kata Kunci** : *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum, Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perkosaan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena

hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.<sup>1</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>2</sup>

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas,maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8

---

<sup>1</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)* , Dioma, Malang, 2006. Hlm 10

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, Jakarta, 2008. Hlm 72

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1).<sup>3</sup>

“Alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi ;
2. keterangan ahli ;
3. surat ;
4. petunjuk ;
5. keterangan terdakwa.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan

---

<sup>3</sup> DC Marbun , *Handout Hukum Pidana*. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 10 Februari 2009

yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 angka ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>4</sup>

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan. Sebuah Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur (LPA Jatim), dalam datanya mengenai tingkat kejahatan perkosaan yang terjadi pada anak, mengungkapkan bahwa kasus perkosaan anak mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Disebutkan dalam laporan tahunan lembaga tersebut, pada tahun 2008 kekerasan seksual pada anak mencapai 85 kasus. Pada tahun 2009 terdapat mencapai 101 kasus dan pada tahun 2010 mencapai 110 kasus.

---

<sup>4</sup> DC Marbun , *Handout Hukum Acara Pidana*. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 10 Februari 2009

Jumlah ini meningkat dibandingkan kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya. Ditengarai bahwa kasus perkosaan yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari data yang diperoleh oleh lembaga tersebut.

Memperhatikan dan yang lebih buruk salah satu dari pelakunya adalah orang terdekat mereka atau bahkan orang tua mereka sendiri. Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama karena sifat dari kasus perkosaan barang buktinya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan.

Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka pihak Kepolisian selaku penyidik tentunya akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan dalam pembuktian sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR”**, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dibawah umur?



- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang dibawah umur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum *visum et repertum* terhadap kasus tindak pidana perkosaan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, kepolisian terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi pihak Kepolisian (penyidik) untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut. Disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai penggunaan bantuan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter pembuat *visum et repertum* dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana.

## 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kekuatan pembuktian *visum et repertum* dan penerapannya oleh pihak Kepolisian selaku penyidik, khususnya dalam mengungkap tindak pidana perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat.

### 1.5 Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Pembuktian

Menurut R.Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.<sup>5</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa . Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, Hlm 1

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, Jakarta, 2008. Hlm 273

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1981 : 71 dst) mengatakan bahwa dalam hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian ialah :

a. Sistem keyakinan belaka

Aliran ini sangat sederhana yang sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan kesan Hakim yang bersifat perseorangan (subyektif). Menurut aliran ini cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak melihat suatu peraturan (*bloot gemoerdelijke, conviction in time*). Dalam sistem ini Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti. Maka dari itu sistem ini tidak dianut di Indonesia.

b. Sistem melulu menurut undang-undang (*positief wettelijk*).

Sistem lain tentang pembuktian yang sangat berbeda dengan sistem keyakinan belaka dengan kata ialah sistem melulu menurut undang-undang, yang dalam bahasa Belanda dinamakan

“*Positief Wettelijk*”. Dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya dan kekuatan pembuktian dari alat bukti itu, sedemikian rupa, bahwa kalau alat-alat bukti itu yang ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar adanya.

- c. Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatif wettelijk*).

Sistem ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction in time*). Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Intinya adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh

keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## **1.5.2 *Visum et Repertum***

### **1.5.2.1 Pengertian *Visum et Repertum***

*Visum et repertum* ialah : “YANG DILIHAT DAN DIKETEMUKAN”. Jadi *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *CORPUS DELICTI* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang

---

<sup>7</sup> R.Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983.  
Hlm 18

menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan *CORPUS DELICTI*.

#### 1.5.2.2 Tujuan *Visum et Repertum*

Tujuan dari *Visum Et Repertum* adalah merupakan rencana (*verslag*) yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya daripada ditarik suatu kesimpulan.<sup>8</sup>

#### 1.5.2.3 Bentuk dan Macam *Visum et Repertum*

*Visum et repertum* terdiri dari 5 bagian yang tetap, yaitu:

- a. Kata *Pro Justitia* yang diletakkan di bagian atas. Kata ini menjelaskan bahwa *visum et repertum* khusus dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak membutuhkan materai untuk dapat dijadikan alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Bagian Pendahuluan. Kata "Pendahuluan" sendiri tidak ditulis dalam *visum et repertum* melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan nama dokter pembuat *visum et repertum* dan institusi kesehatannya, instansi penyidik pemintanya berikut

---

<sup>8</sup> *Ibid* Hlm 21

nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.

- c. Bagian Pemberitaan. Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan" dan hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan/perawatan.
- d. Bagian Kesimpulan. Bagian ini berjudul "Kesimpulan" dan berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya mengenai jenis perlukaan/cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya.<sup>9</sup>
- e. Bagian Penutup. Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku "Demikianlah *visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

Macam *Visum Et Repertum* berdasarkan penggunaannya<sup>10</sup>:

- a. *Visum et Repertum* untuk pelaku kelainan jiwa
- b. *Visum et Repertum* tentang umur
- c. *Visum et Repertum* untuk korban hidup
- d. *Visum et Repertum* untuk korban mayat
- e. *Visum et Repertum* korban pemerkosaan atau tindak pidana kesusiaan
- f. *Visum et Repertum* penggalian mayat

---

<sup>9</sup>Broto Suwiryono, *Handout Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 3 Nopember 2009

<sup>10</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)*, Penerbit Dioma, Malang, 2006. Hlm 34

#### 1.5.2.4 Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dasar Hukum *Visum Et Repertum* diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

#### 1.5.3 Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Moelyatno unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang oleh aturan hukum, ancaman pidana bagi yang melanggar. Perbuatan manusia boleh dilarang oleh hukuman berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok-pokok pengertian terletak pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya (pelakunya).<sup>11</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 72



perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib social).<sup>12</sup>

Pendapat dari R.Sugandhi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian seorang mengeluarkan air mani.<sup>13</sup>

#### **1.5.4 Korban Perkosaan**

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, mereka disini dapat berarti : individu, atau sekelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995, Hlm 25.

<sup>13</sup> R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980. Hlm 302

<sup>14</sup> Arif Goita, *Masalah Perlindungan Anak cetakan kedua*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989. Hlm 75

Menurut Arif Gosita, korban pemerkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek), sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan, oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>15</sup>

Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat UU No.13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,

---

<sup>15</sup>Arif Gosita, *Relevansi Viktimologidengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, Ind. Hill, Co, 1987.Hlm13-14

mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

### **1.5.5 Perlindungan Anak**

#### **1.5.5.1 Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **1.5.5.2 Pengertian Perlindungan Anak**

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan berkewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus

---

<sup>16</sup>Pasal 1 ke-2 UU No.13/2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **1.5.5.3 Sejarah Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak**

Sebagaimana yang diharapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang telah disahkan PBB pada tanggal 20 November 1998 bertujuan untuk menetapkan standar universal bagi hak-hak dan melindungi anak terhadap penyalahgunaan supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai potensi dasar untuk membentuk jati diri menjadi manusia yang bermartabat dan produktif. Dimana Indonesia merupakan salah satu negara pertama kali meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dari 187 negara, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan berkomitmen untuk melaksanakan rangkaian hak-hak anak yang tercantum dalam KHA tentunya mengandung makna dan konsekuensi yang

dalam, maka negara yang turut meratifikasi berarti Negara tersebut telah mengikatkan diri secara hukum atau *Legally Binded* untuk menaati dan melaksanakan berbagai ketentuan yang tercantum pada konvensi itu. Yang prinsipnya adanya informasi mengenai usaha-usaha kegiatan perlindungan anak dan untuk menggairahkan perlakuan dan perlindungan dari penyalahgunaan dan melibatkan anak baik secara langsung atau tidak langsung.

#### **1.5.5.4 Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak**

Asas dan tujuan perlindungan anak terdapat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 2 :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap anak”

Pasal 3 :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, semi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

#### 1.5.5.5. Dasar Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak :

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Konvensi Hak Anak (*the Un’s Convention on the Rights of the child*) Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990
- Konvensi ILO Nomor 138 yang telah diratifikasi Indonesia pada Juni 1999 yang menetapkan batas usia anak bekerja di atas 15 tahun
- Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

tanggal 8 Maret 2000 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak

- Deklarasi Hak Asasi Anak-Anak (*The Rights of the Child*) Tahun 1959
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 yang memperbolehkan anak-anak menjalankan pekerja anak, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang melindungi hak anak <sup>17</sup>.

#### **1.5.5.6 Organisasi Perlindungan Anak**

Organisasi perlindungan anak terdapat di daerah-daerah baik di provinsi maupun di kota atau kabupaten Indonesia misalnya : Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Organisasi Internasional yang membidangi ketenagakerjaan adalah International Labour Organization (*ILO*), yang sejak awal berdirinya telah menargetkan penanggulangan pekerja anak. <sup>18</sup>

#### **1.5.6 Pelaku Tindak Pidana.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku Tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian

---

<sup>17</sup> Hariyo Sulistiyantoro, *Handout Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 27 Desember 2009

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 3

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- 1e.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2e.Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1e.Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2e.Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

#### **1.5.7 Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.**

Menurut kamus hukum sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas



suatu perbuatan dari seseorang yang telah merugikan orang atau pihak lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban, dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Selain daripada itu, sudah saatnya departemen sosial/dinas sosial memikirkan korban-korban kejahatan. Karena pada hakekatnya anggota masyarakat tersebut mengalami musibah, dan perhatian dari aparat sosial yang membidangi masalah sosial sangat berarti bagi para korban.<sup>20</sup>

Untuk tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, berisi ketentuan pidana berupa sanksi pidana maupun sanksi denda. Bila dilihat dan diamati ada beberapa model pemberian sanksi, yakni :

1. Beberapa pasal menggunakan sanksi: pidana minimal sampai dengan maksimal, dan denda minimal sampai dengan maksimal;
2. Ada pasal menggunakan sanksi: pidana saja (minimal dan maksimal);
3. Beberapa pasal menggunakan model sanksi: pidana maksimal dan denda maksimal.

Dan pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur tersebut dapat diancam dengan sanksi yang berat karena telah

---

<sup>19</sup>Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara,2008, Hlm 429

<sup>20</sup>Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika,2004,Hlm 48

melanggar pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.**

Jenis penelitian adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>21</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>22</sup>

### **1.6.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>23</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

---

<sup>21</sup>Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010, h.295

<sup>22</sup>H.Zainuddun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2009, hal 30

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Bandung, Mandar Maju,2008. h 86

### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Peraturan perundang-undangan RI.

### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai hukum primer, hal ini bisa berupa :

- Buku-buku ilmu hukum;
- Jurnal ilmu hukum;
- Laporan penelitian ilmu hukum
- Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan dan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

### 1.6.5 Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>24</sup>

### 1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan didalamnya terdiri dari tujuh sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian sub bab kedua menguraikan tentang perumusan masalah. Selanjutnya di sub bab ketiga disajikan tujuan dan sub bab keempat mengenai manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian sub bab kelima mengenai kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya sub bab keenam diuraikan tentang metode penelitian

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 107.

yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan sub bab ketujuh merupakan sub bab terakhir ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Bawah Umur, terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tentang kekuatan pembuktian menurut KUHAP, sub bab ke dua menguraikan tentang pembuktian dalam tindak pidana perkosaan, sub bab ke dua terdiri dari dua sub bab yaitu menguraikan tentang *visum et repertum* dalam kasus perkosaan, kekuatan pembuktian *visum et repertum*.

Bab III, menguraikan tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Bawah Umur dalam bab ini terdapat empat sub bab yang terdiri dari yang pertama mengenai perlindungan dari keluarga, sub bab kedua membahas tentang bentuk perlindungan hukum dari pemerintah, sub bab ketiga mengenai bentuk perlindungan hukum dari kepolisian, sub bab keempat mengenai bentuk perlindungan dari lembaga swadaya masyarakat.

Bab IV, berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya di Bab IV merupakan Bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai kesimpulan kedua membahas tentang saran.